



KR-Surya Adi Lesmana

BERMAIN DI AIR TERJUN: Sejumlah anak mandi di air terjun aliran sungai kawasan Jembatan Sekarsuli, Jalan Wonosari, Sendangtirto, Berbah, Sleman, Minggu (5/5/2024). Cuaca panas beberapa hari terakhir, menjadikan aliran sungai ini sebagai arena bermain menyenangkan bagi mereka karena bisa sesaat merasakan kesejukan.

KEMENTAN INTENSIF KAWAL

Importir Wajib Tanam Bawang Putih

JAKARTA (KR) - Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian (Kementan) Andi M Lidi Fitri menegaskan, pihaknya terus memacu dan mengawal secara intensif Program Wajib Tanam Bawang Putih bagi Importir, sebagai salah satu upaya menjaga produksi dalam negeri. "Skema wajib tanam ini salah satu upaya menjaga produksi bawang putih dalam negeri," kata Lidi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (5/5).

Lidi menyebutkan, sekitar 100 pelaku usaha impor bawang putih telah menerima Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) Tahun 2023-2024. Importir pemegang rekomendasi dan izin impor

bawang putih telah membuat komitmen untuk melaksanakan wajib tanam dan produksi di dalam negeri, sekurang-kurangnya 5 persen dari volume RIPH. Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis.

La menjelaskan, perkiraan kebutuhan rata-rata nasional bawang putih ditetapkan sekitar 600.000-650.000 ton. Jika bisa konsisten diproduksi 5 persen di dalam negeri, setidaknya 30.000 ton pertahun bisa dihasilkan khusus dari program wajib tanam tersebut. Selebihnya bisa digenot dari swadaya petani maupun stimulus APBN. **(Ant/San)-d**

Indonesia

Sementara itu, tim bulutangkis putri Indonesia yang dimotori Gregoria Mariska Tunjung (Jorji) dan kawan-kawan, juga harus puas menjadi runner up setelah di final menyerah kalah dari tim putri China dengan skor 0-3.

Tim putri Indonesia dalam Uber Cup 2024 hanya ditargetkan masuk semifinal. Tapi para pemain putri Indonesia yang menurunkan Gregoria Mariska Tunjung, Ester Nurumi Tri Wardoyo, Siti Fadia Silva Ramadhanti, Ribka

Sugiarto, Komang Ayu Cahya Dewi, Lanny Tria Mayasari, Rachel Allessya Rose dan Apriyani Rahayu sebenarnya sudah memberikan yang terbaik namun sayang tim putri China sulit untuk dikalahkan. **(Rar)-d**

Hati-hati

Dalam keterangan tersebut, Anna menyoroti risiko yang dihadapi jemaah yang menggunakan visa non haji. Selain tidak bisa melakukan ibadah haji dan mengalami kerugian materi, jemaah yang dideportasi dari Arab Saudi juga tidak diizinkan kembali selama 10 tahun, termasuk untuk beribadah umrah. "Risiko penggunaan visa nonhaji sangat besar. Jadi, masyarakat harus mempertimbangkan risiko tersebut dengan matang," tegas Anna.

Sementara itu, Kemenag, kemarin juga menginformasikan jadwal pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Indonesia. Jemaah dijadwalkan mulai masuk asrama 11 Mei dan secara

bertahap diberangkatkan 12 Mei 2024.

"Proses pembagian kloter (kelompok terbang) dan penyusunan jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah sudah selesai. Kloter pertama mulai terbang 12 Mei Tanah Suci," terang Direktur Layanan Haji dalam Negeri Saiful Mujab di Jakarta, kemarin

Menurutnya, ada 14 asrama haji embarkasi di seluruh Indonesia yang akan melayani pemberangkatan jemaah haji, yaitu Embarkasi Aceh (BTJ), Medan atau Kualanamu (KNO), Batam (BTH), Padang (PDG), Palembang (PLM), Jakarta Pondok Gede (JKG), Jakarta Saudia (CKG SV atau JKS), Kertajati (KJT), Solo (SOC), Surabaya (SUB), Lombok (LOP), Ba-

Sanksi

Masalahnya adalah kapan dimungkinkannya terjadinya sanksi sosial dan bagaimana kita bisa menguji efektivitasnya. Pihak yang mendapatkan sanksi sosial biasanya karena, baik terbukti atau tidak, telah melakukan kejahatan. Yang terbukti melakukan kejahatan, dan telah dihukum (masuk penjara), biasanya sanksi sosial masih berjalan dengan selalu adanya penyebutan mantan, mantan pembunuh, mantan koruptor, mantan maling, dan sebagainya.

Pihak yang telah melakukan kejahatan tersebut mendapat hukuman berlapis, baik dari negara maupun dari masyarakat. Efektivitas sanksi sosial sebenarnya tidak perlu diberlakukan, karena pihak yang telah melakukan kejahatan tersebut sudah mendapat sanksi hukum negara. Namun, kenyataannya, walaupun dalam skala terbatas, masyarakat masih memberikan sanksi sosialnya. Hal tersebut ingin memberikan efek dan pelajaran kepada masyarakat agar jera dan jangan pernah melakukan kejahatan.

Namun, terdapat sejumlah kejahatan yang kadang tidak bisa, tidak dapat, agak sulit mendapat proses hukum negara, se-

hingga pelaku kejahatan tidak diproses secara hukum. Atau, bisa juga pelaku kejahatan diproses secara hukum, tetapi karena kuasa ekonomi dan politik tertentu, pihak pelaku kejahatan bebas dari hukuman. Padahal, sepengetahuan masyarakat, pihak tersebut telah dianggap, baik terbukti maupun tidak, melakukan kejahatan.

Dalam kasus tersebut, sanksi sosial ternyata berlaku dalam jangkauan-jangkauan yang terbatas. Sanksi sosial secara relatif berlaku efektif hanya terhadap orang-orang yang modal sosial, ekonomi, budaya, dan simboliknya relatif kecil. Masyarakat bisa berlaku sewenang-wenang dalam memberlakukan sanksi sosial terhadap mereka yang modal hidupnya kecil. Mereka yang memiliki modal-modal besar/kuat, sanksi sosial relatif tidak memberikan jangkauan yang efektif.

Hal ini paling banyak terjadi terutama untuk kejahatan ekonomi dan politik. Masyarakat tidak memiliki daya sanksi sosial yang kuat terhadap mereka yang melakukan kejahatan ekonomi dan politik, seperti koruptor kelas kakap dan kepada para politisi/pejabat busuk. Hal busuk terjadi karena politisi/pejabat itu itu sering

melakukan kejahatan, tapi sering bebas dari hukum. Negara tebang pilih dalam melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang modal-modalnya besar.

Para koruptor dan politisi/pejabat busuk itu modalnya sudah banyak. Karena modalnya banyak, mereka mampu membeli banyak hal. Daya tawar dan posisi sosialnya biasanya juga relatif di atas, sehingga banyak orang (masyarakat pada umumnya) tidak mampu memberikan tekanan moral dan sosial kepada mereka yang posisi sosial, ekonomi, dan politik relatif di atas/tinggi tersebut.

Bahkan sebagian masyarakat, karena posisi sosialnya lebih sebagai orang awam, dalam keterbatasan modal-modal, memilih untuk tetap menghormati karena adanya semacam ketergantungan sosial yang akan dihadapi masyarakat awam tersebut. Alhasil, sanksi sosial hanya berlaku untuk lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang terbatas. Itupun hanya berlaku kepada mereka yang modal-modalnya kecil. Sanksi sosial hanya berlaku untuk dan sesama orang awam.

(Penulis adalah Kaprodi Magister Sastra FIB UGM)-d

Baggot

tempat ketiga Piala Asia U-23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis (2/5).

Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan penampilan Garuda Muda pada Piala Asia sangat membanggakan karena bisa menjadi empat terbaik dalam kejuaraan tingkat Asia termasuk Australia. "Garuda Muda tampil sebagai tim

Sambungan hal 1

debutan, tapi mampu menjadi salah satu dari empat tim terbaik di turnamen ini, (Piala Asia)," ujarnya.

Erick mengatakan peluang Garuda Muda untuk bisa tampil pada Olimpiade Paris 2024 juga masih terbuka melalui laga melawan Guinea. "Kita harus berjuang di pertandingan melawan Guinea," katanya.

(Ant/Has)-d

Alokasi

itu bisa naik lagi, kalau kita tidak tekan dari sekarang," beberrnya.

Adapun syarat petani untuk menebus pupuk bersubsidi yakni, petani harus tergabung ke dalam Poktan dan terdaftar dalam e-RDKK yang bersumber dari SIM-LUHTAN.

"Pastikan petani terdaftar dalam e-RD-KK. Alokasi pupuk bersubsidi dirinci berdasarkan jenis pupuk, jumlah pupuk, dan sebaran wilayah. Pertimbangan penetapan alokasi : e-RDKK dan rincian alokasi perwilayah dengan mempertimbangkan luas baku sawah dan LP2B," tuturnya.

Sementara, Direktur Jenderal Prasarana

Sambungan hal 1

dan Sarana Pertanian (PSP) Ali Jamil menambahkan, saat ini pihaknya gencar mensosialisasikan Permentan No 01 Tahun 2024. Alokasi pupuk bersubsidi masih banyak untuk tahun ini. Selain itu pada Permentan 01 Tahun 2024 juga ditetapkan penambahan jenis pupuk bersubsidi jenis organik.

"Musim tanam kedua dan berikutnya dipastikan pupuk aman. Sehingga bisa dilakukan percepatan tanam dan produksi karena pemerintah telah menyiapkan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasinya. Dan sekarang juga terdapat jenis pupuk organik," kata Ali. **(Ant/Has)-d**

Oposisi

Kala itu, PDI Perjuangan konsisten berada di luar pemerintahan dan aktif membicarakan berbagai alternatif kebijakan yang bisa dinilai rakyat serta baik bagi sistem pemerintahan dan penyeimbang dan kontrol dari luar pemerintahan.

"Ini menjadi bagian dari edukasi dan pendidikan politik rakyat, sehingga rakyat juga memiliki berbagai alternatif pandangan yang disajikan, baik oleh pemerintah maupun di luar pemerintah," ucap Masinton.

Namun, ia mengingatkan, berada di luar pemerintahan bukan berarti pihak oposisi membenci atau antipemerintah. "Istigma yang selalu salah selama ini, karena kita belum mampu membangun kelembagaan demokrasi, termasuk melembagakan partai-partai politik yang ada di luar pemerintahan," tutur Masinton.

Kendati demikian, Masinton mengungkapkan PDI Perjuangan sejauh ini belum menentukan sikap politik akan berada di dalam atau di luar pemerintahan presiden dan wapres Prabowo-Gibran. Ia menyebutkan keputusan itu akan diambil saat Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan pada 24-26 Mei 2024.

Meski berharap ada parpol yang mengambil sikap oposisi, Andi Malarangeng menuturkan, tetap menyerahkan

Sambungan hal 1

kepada presiden terpilih Prabowo Subianto terkait partai mana yang akan diajak bergabung ke pemerintahan.

Baru-baru ini, Prabowo telah melakukan komunikasi secara langsung dengan NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, terdapat sinyal, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan turut diajak Prabowo ke pemerintahan.

Andi menjelaskan, terdapat kebutuhan untuk menambah koalisi pemerintahan lantaran berdasarkan hasil Pemilu 2024, empat parpol parlemen di Koalisi Indonesia Maju baru mendapatkan 40 persen suara.

Ia mengatakan, penambahan satu partai politik ke pemerintahan sebenarnya sudah cukup untuk mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen karena sudah bisa melebihi 50 persen suara.

Sebelumnya, Peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Lili Romli mengatakan, PDI Perjuangan dan PKS menjadi harapan terakhir untuk duduk di kursi oposisi.

Menurutnya, kekuatan oposisi di DPR masih tetap dibutuhkan secara signifikan agar ada kontrol serta pengawasan terhadap pemerintah. Jika tidak ada oposisi, menurutnya kebijakan yang dimunculkan cenderung merugikan rakyat seperti di era Orde Baru. **(Ant/Obi)-d**

Siap

Tetapi, ia mengingatkan, penyampaian kritik itu bukan dengan cara mencaci maki. Dalam dunia politik, katanya, perlu ada pihak yang mengkritik agar bisa terjadi sebuah keseimbangan. "Siapa saja bisa untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah, termasuk kepada kita," ujarnya.

Pertemuan antar tokoh lintas agama tersebut, lanjut Marsudi, akan lebih sering digelar, sehingga menjadi rutinitas yang membudaya. Pihaknya berharap para tokoh politik bisa meniru kegiatan yang dilakukan para tokoh lintas agama dalam FPID tersebut guna mencairkan suasana pascakegiatan politik lima tahunan.

Sementara itu, tokoh dari Majelis Tinggi Konghucu Indonesia, Budi Santoso mengatakan, negara harus terus bergerak, terlepas dari adanya pihak yang suka atau tidak suka terhadap hasil Pemilu 2024.

"Kita semua setuju untuk memberi ruang dan kesempatan yang dapat mandat untuk meneruskan kepemimpinan Indonesia yang lebih baik,"

kata Budi Santoso.

Selain itu, ia menilai, tidak perlu seluruh pihak dirangkul untuk masuk ke dalam pemerintahan. Pemerintahan ke depan, menurutnya, tetap dibutuhkan oposisi yang menjadi penyeimbang pada jalannya pemerintahan yang baru.

"Tetap diperlukan orang-orang partai maupun pikiran-pikiran yang mampu menyeimbangkan agar kebijakan itu mendapatkan masukan positif dan tidak berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu sangat berbahaya," ujarnya. **(Ant/Obi)-d**



Prakiraan Cuaca

Lokasi	Cuaca			Suhu C	Kelembaban
	Pagi	Siang	Malam		
Bantul	☁	☁	☁	22-30	65-95
Sleman	☁	☁	☁	22-29	65-95
Wates	☁	☁	☁	22-29	65-95
Wonosari	☁	☁	☁	22-30	65-95
Yogyakarta	☁	☁	☁	22-30	65-95

☀ Cerah ☁ Berawan 🌫 Udara Kabur 🌧 Hujan Lokal 🌧 Hujan Pelir



Fitri Juniwati Ayuningtyas, S.E., M.Ec.Dev
Sekretaris Prodi Ekonomi Universitas Amikom Yogyakarta

PERUBAHAN iklim menjadi salah satu isu global yang dibahas dalam pertemuan KTT G20 yang berlangsung di Bali. Hal ini disebabkan karena perubahan iklim selain berdampak terhadap lingkungan, juga dapat mempengaruhi sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, energi, dan industri. Dampak dari perubahan iklim ini menyebabkan pemanasan global,

Greenflation, Dampak Transisi Energi Hijau atau Komoditas Hijau?

cuaca ekstrem, banjir, badai, kekeringan, serta penurunan produktivitas pertanian yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Penanganan akibat kerusakan yang disebabkan oleh perubahan iklim dapat dilakukan dengan mengurangi emisi karbon melalui pembangunan dan pengembangan industri ramah lingkungan sebagai solusi berkelanjutan. Pembangunan rendah karbon merupakan implementasi dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya poin 13 (Climate Action). Namun kebijakan pembangunan rendah karbon masih menjadi tantangan karena membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga dibutuhkan dukungan pembiayaan yang diperoleh dari sektor swasta.

transisi ekonomi konvensional menuju ekonomi hijau. Namun hal ini menimbulkan efek greenflation, yakni fenomena kenaikan harga pada sektor-sektor berbasis ramah lingkungan. Greenflation berasal dari dua kata, "green" dan "inflation". "Green" memiliki makna berkelanjutan atau ramah lingkungan, sedangkan "inflation" adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Terjadinya inflasi hijau sebagai akibat dari transisi energi menuju pengurangan emisi (net zero emission) dapat menimbulkan dampak ekonomi baik produsen maupun konsumen. Penggunaan kendaraan listrik, investasi teknologi hijau, dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dapat menyebabkan peningkatan permintaan terhadap produk dan layanan ramah lingkungan sehingga meningkatkan harga komoditas energi. Upaya untuk mengurangi efek greenflation

adalah dengan meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam jangka panjang dan menurunkan biaya produksi energi.

Konsep greenflation di Indonesia lebih menitikberatkan pada masalah komoditas hijau, yakni pangan dimana hal ini masih menjadi tantangan dalam mencapai ketahanan pangan di masa depan. Bencana kekeringan yang terjadi di musim kemarau dapat menimbulkan efek greenflation yakni kenaikan harga komoditas pangan yang disebabkan penurunan produksi tanaman pangan. Kondisi ini mendorong sektor pertanian melakukan transisi menuju pada praktik pembangunan pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture).

Isu greenflation komoditas hijau masih harus mendapat perhatian baik dari pemerintah selaku pembuat kebijakan serta para stakeholder dan peneliti. Program insentif dan kebijakan yang tepat juga dibutuhkan dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berkesinambungan. Pertanian berkelanjutan merupakan indikator penting dalam mencapai SDGs yang bertumpu pada tiga pilar, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan.



harus mampu berinovasi dan bertransformasi terhadap tantangan sektor pertanian untuk mencapai tujuan SDGs. Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka tekanan dalam pemenuhan kebutuhan juga semakin besar yang mendorong sektor pertanian harus mampu memaksimalkan hasil produksi.

Kegiatan pertanian berkelanjutan mencakup antara lain penggunaan pupuk dan pestisida organik, teknologi hijau, jaringan irigasi yang efisien, dan diversifikasi tanaman. Pendekatan sistem pertanian berkelanjutan diharapkan mampu menghasilkan produksi tanaman pangan dengan kuantitas yang memadai, serta menciptakan produk pangan yang sehat dan berkualitas.